

KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	12

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

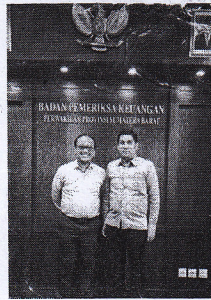
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemko Sawahlunto Jalin Koordinasi dengan BPK

SAWAHLUNTO, METRO

Bertekad meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemko Sawahlunto tingkatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Melalui berbagai langkah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan itu, Pemko menargetkan dapat mempertahankan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya.

Wujud peningkatan koordinasi itu dilakukan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Buyung Lapau dengan menda-



KUNJUNGI BPK— Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta saat mengunjungi BPK RI Perwakilan Sumbar. Deri diterima dalam suasana keakraban oleh Kepala BPK RI Sumbar, Pemut Aryo Wibowo.

wakil Sumatera Barat di Padang, Selasa (29/1). Deri dan Buyung Lapau diterima dalam suasana keakraban oleh Kepala BPK RI Sumbar, Pemut Aryo Wibowo.

Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta mengatakan, baginya sangat penting untuk mengunjungi langsung pihak BPK RI tersebut. Sebab akan lebih besar hasil koordinasi yang didapat ketika ada pertemuan/dialog langsung. Apalagi, Deri juga terhitung baru memimpin 'Kota Arang' sejak dilantik September 2018 lalu. "Silaturahmi langsung ini jauh lebih bagus, lebih baik daripada kita komunikasi melalui surat saja," tutur Deri.

Dipaparkan Deri, selain mengikat silaturahmi lebih erat, kunjungannya dan jajaran terkait ke BPK juga dalam tujuan mengkonsultasikan berbagai hal menyangkut kinerja pengelolaan keuangan di kota dengan 65 ribu lebih penduduk itu. "Kita punya berbagai hal yang perlu dikonsultasikan ke pihak BPK agar tidak salah kebijakan, agar kita paham bagaimana Undang-Undang mengatur itu, kese-

suain dengan regulasi seperti apa. Salah satunya tadi kita konsultasikan terkait aset PT Bukit Asam Ombilin yang dipakai Pemko dengan sistem serwa pakat," ungkap Deri.

Menyangkut laporan keuangan Pemko tahun anggaran 2018, Deri menyebutkan bahwa dirinya menginstruksikan agar BPKAD dapat menyerahkan laporan tersebut sebelum batas akhir penyerahan yang ditetapkan BPK RI. "Laporan keuangan Pemko tahun anggaran 2018 ini kita bertekad bisa diserahkan lebih awal, ada kemungkinan diserahkan pada 21 Februari nanti. Kalau untuk regulasi dari BPK kan paling lambat 31 Maret. Kita ingin serahkan lebih cepat, lebih baik juga," kata Deri.

Menyambut instruksi Deri itu, Kepala BPKAD Buyung Lapau mengatakan siap untuk merealisasikan itu. Juga BPKAD terus bekerja mengawal laporan tersebut kualitasnya terus meningkat sehingga dapat kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sambutan dari BPK RI Sumbar untuk kunjungan Pemko Sawahlunto ini sangat antusias. Pihak BPK menyatakan bersedia menyampaikan advis (arahan) dan pendapat sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pihak BPK RI Sumbar dalam momen itu juga sempat menyampaikan tentang perkembangan metode pemeriksaan keuangan yang disesuaikan dengan teknologi informasi (TI). Yakni melalui sistem E - Audit, dimana di sistem itu dengan sistem informasi terpadu semua dokumen dapat diakses untuk diperiksa BPK. (zek)